



**PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN TARGET TIAP TRIWULAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun

2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, maka Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Target Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Target Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);]
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah

Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TARGET TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Target Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Target Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 30) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Oktober 2011

BUPATI KARANGASEM,
Ttd.
I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 6 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,
Ttd
I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2011 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

A. A Ngurah Ketut Nurwana

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 6 OKTOBER 2011 NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PENETAPAN TARGET TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2011

| Target Penerimaan Tiap Triwulan | | | | | | | | | | | | | | | | Nama SKPD |
|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| Triwulan I | | | | Triwulan II | | | | Triwulan III | | | | Triwulan IV | | | | |
| Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | |
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.172.250 | 11,29 | 1.172.250 | 11,29 | 1.953.18,8 | 3.126.000 | 30,11 | 4.661.44,8 | 7.787 | 75 | 2.595 | 25 | 10.383 | 100 | 026.000 | | Dinas |
| | | | | 750.000 | 1 | 000 | | 270.000 | 9 | 270.000 | 756.000 | | | | | Dinas |
| 418.800 | 10,36 | 418.800 | 10,36 | 698.000 | 17,2 | 1.116.800 | 27,64 | 1.913.47,3 | 3,030 | 75 | 1.010 | 25 | 4.040 | 100 | | Dinas |
| 3.000.000 | 8,33 | 3.000.000 | 8,33 | 5.000 | 13,8 | 8.000.000 | 22,22 | 19.000 | 52,7 | 27.000 | 75 | 9.000 | 25 | 36.000 | 100 | Dinas |
| | | | | 000 | 9 | 000 | | 000 | 8 | 000 | 000 | | | | | Dinas |
| 45.000.000 | 14,15 | 45.000.000 | 14,15 | 75.000 | 23,5 | 120.000.000 | 37,74 | 118.500 | 37,2 | 238.50 | 75 | 79.500 | 25 | 318.000 | 100 | Dinas |
| 600.000 | 12,50 | 600.000 | 12,50 | 1.000 | 20,8 | 1.600.000 | 33,33 | 2.000 | 41,6 | 3.600 | 75 | 1.200 | 25 | 4.800 | 100 | Dinas |
| 2.010.000 | 3,59 | 2.010.000 | 3,59 | 3.350 | 5,99 | 5.360.000 | 9,58 | 36.581 | 65,4 | 41.941 | 75 | 13.980 | 25 | 55.922 | 100 | Dinas |
| | | | | 000.000 | | 000 | | 884.000 | 2 | 884.000 | 627.70 | | | 511.703 | | Dinas |
| 2.250.000 | 17,05 | 2.250.000 | 17,05 | 3.750 | 28,4 | 6.000.000 | 45,46 | 3.900.000 | 29,5 | 9.900 | 75 | 3.300 | 25 | 13.200 | 100 | Dinas |
| 52.500.000 | 7,72 | 52.500.000 | 7,72 | 87.500 | 12,8 | 140.000.000 | 20,59 | 370.000 | 54,4 | 510.000 | 75 | 170.000 | 25 | 680.000 | 100 | Dinas |
| | | | | | | | | | | | | 10.000 | 100 | 10.000 | | |
| 120.000 | 12,63 | 120.000 | 12,63 | 200.000 | 21,0 | 320.000.000 | 33,68 | 392.500 | 41,3 | 712.500 | 75 | 237.500 | 25 | 950.000 | 100 | Dinas |
| | | | | 000 | 5 | 0 | | 000 | 2 | 0 | | 0 | | 000 | | |
| 4.423.800 | | 4.423.800 | | 7.373 | | 11.796.800 | | 46.060 | | 57.857 | | 19.295 | | 77.153 | | |

| Target Penerimaan Tiap Triwulan | | | | | | | | | | | | | | | | Nama SKPD |
|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|
| Triwulan I | | | | Triwulan II | | | | Triwulan III | | | | Triwulan IV | | | | |
| Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | Triwulan Ini | s/d Triwulan Ini | |
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 187.500 | 13,89 | 187.500 | 13,89 | 312.500 | 23,1 | 500.000.000 | 37,04 | 512.500 | 37,9 | 1.012 | 75 | 337.500 | 25 | 1.350.000 | 100 | Dinas |
| | | | | 000 | 4 | | | 000 | 6 | 500.000 | | 0 | | 000 | | Kesehatan |
| 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 30.000 | 25 | 48.000.000 | 40 | 42.000 | 35,90 | 000 | 75 | 30.000 | 25 | 120.000 | 100 | DKP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.750.000 | 19,29 | 6.750.000 | 19,29 | 11.250 | 32,1 | 18.000.000 | 51,43 | 8.250 | 23,5 | 26.250 | 75 | 8.750 | 25 | 35.000.000 | 100 | Dinas |
| 12.000 | 16 | 12.000 | 16 | 20.000 | 26,6 | 32.000.000 | 42,67 | 24.250 | 32,5 | 6.250 | 75 | 18.750 | 25 | 75.000.000 | 100 | Dan Capil |
| | | | | 000 | 6 | | | 000 | 3 | 000 | | 000 | | | | |
| 19.500 | 15 | 19.500 | 15 | 32.500 | 25 | 52.000.000 | 40 | 45.500 | 39,97 | 5.000 | 75 | 32.500 | 25 | 130.000.000 | 100 | DISHUB & |
| | | | | 000 | | 000 | | 000 | 000 | 000 | | 000 | | 0 | | PMK |
| 187.500 | 15 | 187.500 | 15 | 312.500 | 25 | 500.000.000 | 40 | 437.500 | 38 | 937.500 | 75 | 312.500 | 25 | 1.250.000 | 100 | Dinas |
| 24.750 | 14,14 | 24.750 | 14,14 | 41.250 | 23,5 | 66.000.000 | 37,71 | 65.250 | 37,4 | 131.25 | 75 | 43.750 | 25 | 175.000.000 | 100 | DISHUB & |
| | | | | | | | | | | | | 69.000 | 100 | 69.000.000 | 100 | DKI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.500.000 | 16,20 | 40.500.000 | 16,20 | 67.500 | 27 | 108.000.000 | 43,20 | 79.500 | 31,8 | 187.500 | 75 | 62.500 | 25 | 250.000.000 | 100 | Dinas |
| | | | | 000 | | 000 | | 000 | 0 | 000 | | 000 | | 0 | | Pendapatan |
| 2.250.000 | 10,25 | 2.250.000 | 10,25 | 3.750 | 17,0 | 6.000.000 | 27,33 | 15.954 | 72,821 | 954 | 100 | | | | 100 | Disdikpora |
| 10.500.000 | 30 | 10.500.000 | 30 | 17.500 | 50 | 28.000.000 | 80 | 7.000 | 20 | 35.000 | 100 | | | | 100 | DPUK |

| No | Uraian | Target dalam Satu tahun |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I.PAJAK DAERAH | |
| 1 | Pajak Hotel | 10.383.02 |
| | | 6.000 |
| 2 | Pajak Restoran | 4.040.974 |
| 3 | Pajak Hiburan | 36.000.000 |
| | | 0 |
| 4 | Pajak Reklame | 318.000 |
| 5 | Pajak Penerangan | 4.800.000 |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam | 55.922.51 |
| | | 1.703 |
| 7 | Pajak Paikir | 13.200.000 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 680.000 |
| 9 | Pajak Sarang | 10.000.000 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas | 950.000 |
| | | 000 |
| | Jumlah | Pajak 77.153.71 |

| No | Uraian | Target dalam Satu tahun |
|----|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | c. Retribusi | |
| 14 | Ret. Izin Trayek | 10.000 |
| 15 | Ret. Izin Mendirikan | 800.000 |
| 16 | Ret. Izin Gangguan | 160.000 |
| | Jumlah Retribusi Daerah | 1.030.000 |
| | Jumlah Seluruhnya | 84.056.05 |